

Briefing Subsidi Energi Indonesia



GSI Global Subsidies Initiative



International Institute for Sustainable Development Institut international du développement durable

SEPTEMBER
2013

SEBAGAI BAGIAN DARI AKTIVITAS KAMI DI SEKTOR KEBIJAKAN ENERGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA, GLOBAL SUBSIDIES INITIATIVE (GSI) DARI INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (IISD) MEMPUBLIKASIKAN SEBUAH TERBITAN BERKALA TENTANG ISU-ISU TERKAIT SUBSIDI ENERGI. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HARAP HUBUNGI LUCKY LONTOH DI ALAMAT EMAIL LUCKY.LONTOH@IISD.ORG DAN CHRISTOPHER BEATON DI ALAMAT CBEATON@IISD.ORG.

Rancangan Subsidi BBM Indonesia 2014ⁱ

Pada 16 Agustus lalu, pemerintah menyerahkan Rancangan APBN tahun anggaran 2014, di mana subsidi energi kembali menjadi salah satu pos pengeluaran pemerintah pusat terbesar yang nilainya mencapai IDR 284,66 triliun, atau sekitar 23,14 persen dari pengeluaran total pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mendapatkan porsi sebesar IDR 194.89 triliun (Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014).

Tabel 1. Rancangan Subsidi BBM Indonesia 2014 (dalam milyar Rupiah)

Penjelasan	2013	2013 APBN-P	2014 RAPBN
Subsidi Listrik	80.937,8	99.979,7	89.766,5
Subsidi BBM	146,461.8	199,850.0	194,893.1
- Bensin (Premium dan Biofuel)	87.195.1	149,784.4	131,222.9
- Minyak tanah	8,035.1	6,653.6	6,106.6
- Diesel (Solar dan Biofuel)	51,231.7	59,646.3	56,301.9
- LPG 3kg silinder	26,452.0	31,523.7	36,770.8
- Liquefied Gas for Vehicles (LGV)	100.0	100.0	100.0
- PPN	17.291.4	18,130.8	16,799.4
- Kekurangan bayar (carryover) subsidi BBM untuk tahun anggaran mendatang	-	(22,565.4)	-
- Kekurangan bayar (carryover) subsidi BBM dari 2010	-	0.03	-
- Kekurangan bayar (carryover) subsidi BBM dari 2011	3,500.0	4,029.7	-
- Perkiraan kekurangan bayar (carryover) subsidi BBM dari 2012	-	18,846.7	-
- Perkiraan kekurangan bayar (carryover) subsidi BBM dari 2013	-	-	10,000.0

Sumber : Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 (2013).

Rancangan ini didasarkan pada sejumlah asumsi makroekonomi, yaitu inflasi yang diperkirakan mencapai 4,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp. 9.750, tingkat suku bunga sebesar 5,5 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 106 per barel, produksi minyak sebesar 870.000 barel per hari, dan

ⁱ Risalah ini menggunakan nilai tukar rupiah Rp9.600/US\$1 sebagai dasar perhitungan hingga dan mencakup tahun 2013, serta Rp9.750/US\$1 untuk data 2014.





Briefing

Subsidi Energi

produksi gas sebesar 1.240.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah juga mengharapkan ekonomi Indonesia akan bertumbuh sebesar 6,4 persen pada 2014 (Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014). Perkiraan subsidi BBM untuk 2014 adalah sekitar Rp. 5 milyar lebih rendah dibandingkan perkiraan biaya subsidi BBM total di 2013, walaupun diperkirakan konsumsi BBM akan mencapai 50,5 juta kiloliter, yang berarti 5% lebih tinggi dari alokasi pada 2013 (Metrotvnews, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah optimis harga minyak mentah internasional pada 2014 akan lebih rendah daripada 2013, dan pemerintah juga yakin mampu menstabilkan dan memperbaiki nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar.

Usulan ini juga didasarkan pada nilai alpha baru (alpha rate) untuk harga BBM bersubsidi. Alpha rate merupakan komponen di dalam struktur harga BBM subsidi Indonesia yang mencakup biaya distribusi dan margin laba bagi distributor. Pada 2012, alpha rate untuk BBM bersubsidi adalah Rp613,9 per liter dan pada 2013 alpha rate juga ditetapkan pada Rp666,60 per liter. Pada 2014, nilai tersebut meningkat hingga Rp718,4 per liter (Nota Fiskal dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013).

Menurut Rancangan APBN 2014, pemerintah akan terus melakukan program-program yang sudah dijalankan selama ini untuk mengendalikan subsidi BBM. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program konversi minyak tanah ke LQP (liquefied petroleum gas) silinder dan mendorong industri bahan bakar alternatif untuk memperbaiki bauran energi. Pemerintah juga akan mencoba memperkenalkan sejumlah sistem baru pada tahun anggaran 2014 yang dapat mengidentifikasi konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi dan menerapkan suatu "sistem distribusi tertutup" (Nota Fiskal dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014).

Istilah "sistem distribusi tertutup" merujuk pada sebuah sistem di mana BBM bersubsidi dapat didistribusikan dengan cara yang terkendali kepada sejumlah penerima yang menjadi sasaran. Rencana untuk menjalankan sistem ini sudah dibahas cukup lama, dan pertama kali dituangkan dalam peraturan pada awal masa jabatan kedua Presiden SBY dalam Perpres No.45/2009 yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2009. Belum ada informasi mendetail mengenai "mekanisme kendali" apa yang akan digunakan. Walaupun ada sejumlah upaya untuk menjalankannya, rencana tersebut di atas tidak pernah benar-benar terwujud, dan hingga saat ini kebijakan pembatasan subsidi BBM baru terbatas pada kendaraan pemerintah dan satu-satunya bentuk mekanisme kontrol yang sudah diberlakukan adalah kartu identitas bagi nelayan dan percobaan penggunaan alat RFID (Identifikasi Frekuensi Radio/Radio Frequency Identification) di sejumlah SPBU.

Bahkan sekalipun upaya-upaya di atas tersebut berjalan penuh, masih diperlukan waktu dan konsistensi hingga strategi pengendalian berbiaya tinggi ini dapat dilaksanakan secara efektif. Pemasangan RFID di kendaraan-kendaraan bermotor baru saja dimulai dan dibatasi untuk kendaraan-kendaraan PT Pertamina dan pemerintah (bandungekspress.com, 2013). BPH Migas sebagai regulator migas hilir juga telah mengeluarkan instruksi untuk memasang RFID di setiap SPBU dan kendaraan bermotor pribadi pada 22 Mei 2013 (Peraturan BPH Migas No.6/2013), namun pelaksanaannya tertunda hingga Agustus 2013 (Beritasatu.com, 2013). Jadwalnya kemudian kembali diundur hingga September 2013 karena adanya kesulitan dalam menyediakan peralatan yang diimpor yang diperlukan (Energytoday.com, 2013).

Masalah dari pengeluaran subsidi BBM yang tinggi mungkin masih belum bisa diselesaikan Indonesia, bahkan setelah perjuangan berat menaikkan harga BBM pada Juni 2013. Dr. Ninasapti Triaswati, Anggota Dewan





Briefing

Subsidi Energi

Ekonomi Nasional, menyatakan keraguannya terkait apakah kenaikan harga BBM yang terakhir akan cukup untuk mengkompensasi peningkatan permintaan BBM, kecuali jika diikuti dengan inovasi diversifikasi energi yang signifikan (Investor Daily, 2013).

Pandangan Politik terhadap Rancangan Subsidi BBM

Pada tanggal 20 Agustus sejumlah partai politik di DPR menyampaikan pendapatnya mengenai RAPBN 2014 yang diusulkan pemerintah. Ringkasan dari komentar-komentar tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. Pandangan Umum 9 Partai Politik tentang Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia untuk 2014

No.	Partai Politik	Komentar
1	Partai Demokrat	Partai Demokrat mendukung kebijakan untuk mereformasi sistem subsidi dari subsidi harga umum menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran.
2	Partai Golkar	Tidak ada komentar mengenai subsidi energi.
3	PDI-P	PDI-P berpandangan bahwa pemerintah gagal mengartikulasikan janjinya untuk mengompensasi pemotongan subsidi dengan pembangunan kapital dan infrastruktur, karena dana untuk transportasi, irigasi, pertanian, konstruksi, telekomunikasi dan lainnya telah dikurangi dari Rp103 triliun pada 2013 menjadi Rp99,5 triliun pada 2014.
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	PKS mengeluarkan sejumlah komentar, yang antara lain menegaskan agar pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki formula alpha, yang mencakup PPN; 2. Menerapkan sistem distribusi tertutup untuk mencegah masyarakat di luar sasaran menikmati BBM bersubsidi; 3. Memperbaiki proses pemilihan target dan akurasi volume BBM bersubsidi. <p>Selain hal di atas, PKS juga mengkritik kenaikan harga baru-baru ini karena waktunya bertepatan dengan bulan Ramadhan, ketika harga barang sepatutnya diduga akan naik, meskipun tidak ada kenaikan harga BBM. Hal ini membebani masyarakat dan dunia usaha Indonesia.</p>
5	Partai Amanat Nasional(PAN)	Tidak ada komentar mengenai subsidi energi.
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Fraksi PPP berpandangan bahwa tingginya jumlah subsidi energi pada 2014 menunjukkan pemerintah masih menjalankan praktik yang menguntungkan kelompok ekonomi yang lebih mampu. PPP merekomendasikan agar subsidi BBM dapat dialokasikan bagi petani dan sektor pertanian, karena kelompok tersebut lebih relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan serta perbaikan kemandirian dan keamanan pangan Indonesia.
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Fraksi PKB memandang diteruskannya subsidi energi pada 2014 menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mendukung masyarakat miskin dengan mempertahankan stabilitas harga barang dan jasa dalam negeri. PKB juga menuntut adanya data dan informasi yang lebih transparan dalam menentukan subsidi dan mekanisme distribusi yang lebih kredibel.





Briefing

Subsidi Energi

8	Partai Gerindra	Fraksi Partai Gerindra mendukung diteruskannya kebijakan subsidi bahan bakar dan memandang pemotongan subsidi bahan bakar sebagai bagian dari pendekatan neoliberal yang diadopsi oleh pemerintah. Partai Gerindra meyakini bahwa subsidi adalah kebijakan fiskal yang tepat.
9	Partai Hanura	Pemerintah wajib memperbaiki bauran energi dengan menggunakan sumber-sumber energi baru dan terbarukan.

Sumber: Fraksi Partai Demokrat (2013), Partai Golkar (2013), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2013), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (2013), Fraksi Partai Amanah Nasional (2013), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (2013), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (2013), Fraksi Partai Gerindra (2013), Fraksi Partai Hanura (2013).

Beragamnya posisi dari berbagai fraksi mengenai kebijakan subsidi BBM menunjukkan adanya keseimbangan dalam pro-kontra antara fraksi-fraksi tersebut. Di satu sisi, Partai Demokrat dan PPP menunjukkan posisi yang jelas mendukung perubahan praktik subsidi. Di sisi lain, PKB dan Partai Gerindra jelas mendukung diteruskannya kebijakan subsidi. Bagi PKB, subsidi BBM adalah bukti komitmen pemerintah kepada masyarakat miskin, sementara Partai Gerindra menolak dicabutnya subsidi karena hal ini dipandang sebagai kebijakan neoliberal.

Fraksi-fraksi politik lainnya menunjukkan posisi yang moderat mengenai reformasi kebijakan subsidi BBM, dan mendorong agar dilakukan perbaikan dalam mekanisme subsidi dan manajemen energi di masa mendatang. Partai Golkar dan PAN yang merupakan anggota koalisi yang berkuasa tidak memebrikan komentar tentang isu ini.

Pada saat risalah ini diterbitkan, pembahasan mengenai APBN 2014 masih terus berjalan, dan proses tersebut dijadwalkan untuk selesai pada pertengahan atau akhir Oktober 2013.

Referensi

Bandungekspress.com. (2013, September 4). Pemasangan RFID Rampung Akhir Tahun Ini. Retrieved from: <http://bandungekspress.com/id/2013/09/04/pemasangan-rfid-rampung-akhir-tahun-ini/>

Beritasatu.com. (2013, July 9). Pemasangan RFID Ditunda Hingga Agustus. Retrieved from: <http://www.beritasatu.com/ekonomi/124645-pemasangan-rfid-ditunda-hingga-agustus.html>

Energytoday.com. (2013, September 3). Pertamina Kembali Undur Pemasangan Alat RFID. Retrieved from: <http://energytoday.com/2013/09/03/pertamina-kembali-undur-pemasangan-alat-rfid/>

Fraksi Partai Amanat Nasional. (2013). Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 20 August 2013.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (2013). Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. 20 August 2013.

Fraksi Partai Demokrat. (2013). Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang RAPBN 2014 dan Nota Keuangannya. 20 August 2013.





Briefing

Subsidi Energi

Fraksi Partai Gerindra. (2013). Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014. 20 August 2013.

Fraksi Partai Golongan Karya. (2013). Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (RAPBN) beserta Nota Keuangannya. 20 August 2013.

Fraksi Partai Hanura. (2013). Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 20 August 2013.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (2013). Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 beserta Nota Keuangannya. 20 August 2013.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. (2013). Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 20 August 2013.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. (2013). Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. 20 August 2013.

Investor Daily. (2013, June 28). Kenaikan Harga BBM tak Otomatis Hemat APBN. Retrieved from: <http://www.investor.co.id/home/kenaikan-harga-bbm-tak-otomatis-hemat-apbn/63751>

Metrotvnews. (2013, August 18). Menteri ESDM Optimistis Kuota BBM Subsidi Cukup. 18 August 2013. Retrieved from: <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/18/2/175589/Menteri-ESDM-Optimistis-Kuota-BBM-Subsidi-Cukup>

Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2014.

Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013.





Briefing

Subsidi Energi

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development

Head Office

161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4

Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org

About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development

Global Subsidies Initiative

International Environment House 2

9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 917-8373 | Fax: +41 22 917-8054

